BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998. Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Di dalam UUD RI tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga

negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka menerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang. Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.

Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan dalam sistem pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara professional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara professional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta

penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multi makna.

Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.¹

Selama ini yang dijalankan Pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia masih terdapat diskriminasi khususnya antara pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan yang bisa dilihat dari muatan kurikulum maupun batasan-batasan kurikulum yang masih berfokus pada pendidikan umum sedangkan pada pendidikan keagamaan belum terdapat kejelasan.

Menjelang dan sesudah pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pemerintah berusaha meyakinkan kalangan pondok pesantren bahwa regulasi tersebut akan berdampak positif dan menguntungkan institusi pendidikan tertua di nusantara ini. Tetapi kalangan pesantren juga perlu memperhatikan akibat yang tidak kecil dari implementasi peraturan tersebut dengan alasan sejarah telah membuktikan bahwa pesantren bukanlah lembaga pendidikan semata. Sebagaimana diungkapkan oleh Nafi' (2007:11-33), dalam sejarah panjangnya, peran pesantren telah melingkupi enam ranah penting sekaligus, yaitu sebagai lembaga pendidikan, lembaga keilmuan, lembaga pelatihan, lembaga pemberdayaan masyarakat, lembaga bimbingan keagamaan, dan simpul budaya. Keenam peran tersebut pada

¹Penjelasan UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003

umumnya dijalankan pesantren secara bertahap. Dan, peran sebagai lembaga pendidikan adalah tahap pertama dari keseluruhan peran tersebut. Dalam konteks inilah pesantren harus menghitung secara cermat segala konsekuensi dari implementasi PP 55/2007. Saat ini kita belum tahu apakah peraturan tersebut akan menjadi sisi positif atau negatif bagi eksistensi pesantren di masa depan. Harus dihitung dengan cermat, apakah PP 55/2007 akan mendorong pengembangan peran pesantren secara optimal atau justru mereduksi perannya sekadar sebagai lembaga pendidikan.²

Salah satu bentuk pendidikan keagamaan yang dicantumkan dalam Undang-Undang adalah Madrasah diniyah. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah, Madrasah diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama islam.

Masuknya lembaga madrasah diniyah dalam Undang-undang maupun pada Peraturan Pemerintah dapat dijadikan bukti tertulis bahwa Pemerintah telah memperhatikan lembaga ini. Namun di sisi lain Pemerintah membedakan bentuk jalur maupun jenjang dari madrasah diniyah yang terbagi dalam kategori madrasah diniyah formal, informal, maupun non-formal. Perhatian Pemerintah di

²<http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/seputar-pesantren/1228-pp-552007-politik-akomodasi-atau-taktik-hegemoni>

dalam Undang-undang hanya memperlakukan madrasah diniyah yang berstatus Formal saja yang mendapat pengakuan resmi sedangkan untuk madrasah diniyah informal dan non-formal hanya diakui sebatas keberadaannya saja.

Pendidikan agama merupakan bagian pendidikan yang sangat penting yang berkenaan dengan aspek-aspek sikap dan nilai, antara lain akhlak dan keagamaan. Oleh karena itu pendidikan agama juga menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan Pemerintah.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional, dalam pendidikan agama diperlukan (a) paket-paket minimal bahan pendidikan agama dari masing-masing agama yang dianut dengan mempertimbangkan perkembangan jiwa anak didik; (b) guru agama yang cukup dan memenuhi syarat; (c) sarana dan prasarana yang cukup dan memenuhi syarat; (d) lingkungan yang mendorong tercapainya tujuan pendidikan agama, diantaranya situasi sekolah, masyarakat dan perundang-undangan.³

Lingkup pendidikan agama pada lembaga atau perguruan agama meliputi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Diniyah, Pendidikan Guru Agama, Pesantren dan Perguruan Tinggi Agama Islam baik negeri maupun swasta.

Sebagian besar lembaga pendidikan agama berstatus swasta. Hanya 0,37% dari seluruh sekolah agama berstatus negeri dan hanya 4,5% dari murid-murid berada di sekolah negeri. Ini berarti bahwa pada satu segi kehadiran sekolah-

³Zakiah Daradjat dkk, "*Ilmu Pendidikan Islam*", (Bumi Aksara : Jakarta) h. 87

sekolah agama berurat dan berakar pada hasrat masyarakat sendiri dan pada segi lain sekolah-sekolah agama negeri harus mempunyai fungsi keteladanan terhadap sekolah-sekolah agama swasta.

Maksud dan tujuan meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah adalah agar tingkat mata pelajaran umum dari madrasah dapat mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum di sekolah umum yang setingkat, sehingga :

1. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat.
2. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas.
3. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.⁴

Madrasah Miftahul Ulum adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang dibesarkan di dalam lingkungan Pondok Pesantren Sidogiri Kabupaten Pasuruan dan termasuk salah satu Madrasah Diniyah yang mendapatkan ijazah muadalah dari Kementerian Agama.

Keberadaan Madrasah Miftahul Ulum sebagai madrasah diniyah salafiyah di lingkungan pesantren tidak menutup diri dari keilmuan yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Secara administratif dan pengembangan kurikulum yang diterapkan ditetapkan berdasarkan dari rambu-rambu yang telah disusun berdasarkan jenjang atau masing-masing kelas. Seperti pada madrasah diniyah lainnya, Madrasah Miftahul Ulum menggunakan kitab-kitab salaf sebagai

⁴Ibid, h.97

pelajaran santrinya, namun seiring dengan adanya ijazah muadalah dari Kementerian Agama maka Madrasah Miftahul Ulum harus memasukkan beberapa pelajaran umum yang ditetapkan oleh pemerintah dimana kurikulumnya juga harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas, menggambarkan bahwa disamping adanya UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 yang dianggap sebagai penyelarasan pendidikan umum dengan pendidikan agama maupun keagamaan, keberadaan madrasah diniyah salafiyah yang sebenarnya bercorak pendidikan murni pesantren tidak berlaku di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan yang memadukan kurikulum pesantren murni dengan kurikulum pendidikan nasional sehingga penulis mengambil judul penelitian tentang Implementasi UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 dalam pengembangan kurikulum madrasah diniyah di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya, adalah:

1. Bagaimana pengembangan kurikulum madrasah diniyah di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan ?
2. Bagaimanaimplementasi UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 dalam pengembangan kurikulum madrasah diniyah di Madrasah Miftahul Ulum

Sidogiri Pasuruan ?

3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat implementasi UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 dalam pengembangan kurikulum madrasah diniyah di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 dalam pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan.
3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat implementasi UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 dalam pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sebagai bahan koreksi bagi Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan untuk menjaga serta meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan

terutama pada masalah pengembangan kurikulumnya dengan cara mempertahankan dan meningkatkan segala faktor pendukungnya serta mengurangi atau menghilangkan berbagai faktor penghambatnya

2. Dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan terhadap kesesuaian kurikulum yang diterapkan dengan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003.
3. Penelitian ini juga berguna bagi Pengasuh maupun Pengelola madrasah diniyah yang lain sebagai bahan pertimbangan dan tolak ukur mengembangkan madrasahnyanya sehingga dapat menjadi madrasah diniyah yang memiliki kurikulum yang diakui oleh Pemerintah dan mendapatkan ijazah muadalah.

E. Definisi Operasional

Untukmendapatkangambaranyangjelastentangpengertiandalamjudulskripsii ni, makapenulistegaskanbeberapaistilah-istilahyangterdapatdalamjudulskripsiini, yakni sebagaiberikut.

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, kebijakan, atau motivasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap.⁵

⁵Mulyasa, "*Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik Dan Implementasi*" (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2003), h.93.

2. Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003

Merupakan Undang-undang yang disahkan oleh Pemerintah untuk mengatur sistem pendidikan nasional di Indonesia.

3. Kurikulum

Kurikulum adalah rangkaian rencana pembelajaran yang memuat isi dan materi pembelajaran serta segala kegiatan pengalaman yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan / mata pelajaran.⁶

4. Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan agama yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam ilmu pengetahuan agama Islam.⁷

5. Madrasah Miftahul Ulum

Madrasah Miftahul Ulum adalah salah satu lembaga keagamaan dalam bentuk Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan yang mendapat ijazah muadalah dari Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama).

Jadi yang dimaksud dengan Implementasi UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 dalam pengembangan kurikulum madrasah diniyah di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan adalah penerapan dalam suatu tindakan yang berdasarkan

⁶Burhan Nurgiantoro, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah*, (Yogyakarta: BPFE,1988) h. 17

⁷Depag RI, *Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah*, (Jakarta,Dirjen Binbaga Islam Depag RI 2003) h. 1

UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 terhadap serangkaian perangkat pembelajaran lembaga pendidikan yang berlaku di madrasah tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena tertentu dengan bertumpu pada prosedur-prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku secara holistik (utuh). Dalam penelitian deskriptif-kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut mungkin berupa naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen resminya.⁸

Penelitian ini memilih pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan permasalahan penelitian bersifat kompleks, holistik, dinamis dan penuh makna. Sehingga dalam penelitian deskriptif-kualitatif yang menjadi tujuannya adalah ingin menggambarkan realitas empiris yang sebenarnya sesuai dengan fenomena yang ada secara mendalam, rinci, dan tuntas.⁹

⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 1989), h.7

⁹Sanafiyah Faisal, *Pokok-Pokok Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Makalah Latsar penelitian, 1991), h.3

2. Jenis Data

Data adalah suatu hal yang diperoleh dilapangan ketika melakukan penelitian dan belum diolah, atau dengan pengertian lain, yaitu suatu hal yang dianggap atau diketahui. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk angka.

Yang termasuk data kualitatif adalah :

- a. Undang-undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003
- b. Gambaran umum Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan
- c. Dokumen-dokumen tertulis yang sesuai dengan penelitian penulis.

3. Sumber Data

Menurut sumber datanya dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Sumber data primer

Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-undang Sisdikas No.20 Tahun 2003
- 2) Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan

- b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam hal ini diperoleh dan berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa jurnal, buku, dokumen, majalah, serta literatur-literatur lain yang terkait dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni membicarakan tentang proses pencarian data yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data, antara lain :

- a. Metode Observasi. Menurut Marshall (1995), menyatakan bahwa “*through observation researcher learn about behavior and meaning attached to those behavior*”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.¹⁰ Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan peneliti termasuk dalam jenis observasi terstruktur atau terencana. Yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terstruktur atau terencana dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.
- b. Metode Wawancara (*interview*), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait sebagaimana tercantum dalam data primer.
- c. Metode Dokumentasi, yakni mengumpulkan data-data tertulis mengenai

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2007), h.226

penelitian di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan membuat kesimpulan.¹¹

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah deskripsi analitik yaitu menggambarkan dan memaparkan konsep Undang-undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 dan implementasinya dalam pengembangan kurikulum madrasah diniyah secara cermat dengan konsep yang berkembang saat ini.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam analisis data ini adalah :

a. Reduksi Data (Reduction Data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pengabstrakan, penyederhanaan, pemusatan perhatian dan transparansi data yang muncul dalam catatan lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk

¹¹Sugiono, Ibid, ... h.243

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.¹²

b. Penyajian Data (Display Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Display data merupakan suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian, serta dapat diselingi gambar, skema, table, rumus dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil observasi, interview maupun studi dokumentasi.

Penyajian data ini merupakan hasil reduksi data yang telah dilakukan sebelumnya agar menjadi sistematis dan bisa diambil maknanya, karena biasanya data yang terkumpul tidak sistematis.

c. Verifikasi/ Penarikan Simpulan Data

Verifikasi/penarikan simpulan data merupakan langkah ketiga dalam proses analisis data. Langkah ini dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul, yang mengarah pada UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 pasal 30 dan Implementasinya dalam pengembangan kurikulum madrasah diniyah di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan dan di akhir dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. Kesimpulan yang pada awalnya masih sangat

¹² Ibid, h.247

tentative, maka dengan bertambahnya data menjadi lebih *grounded*. Verifikasi ini merupakan proses memeriksa dan menguji kebenaran data yang telah dikumpulkan, sehingga kesimpulan akhir didapati sesuai dengan fokus penelitian, dan simpulan akhir ini diharapkan memiliki relevansi sekaligus menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

6. Rencana pengujian Validitas Data

Uji validitas data ini dilakukan untuk mengukur keabsahan data yang diperoleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa cara sebagai pengujian validitas data, yakni :

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan narasumber dan narasumber bisa lebih akrab, semakin terbuka, saling mempercayai dan tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Dengan demikian data yang diterima menjadi semakin valid.¹³

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara

¹³ Ibid, ... h.270

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan ini, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali, apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak dan dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.¹⁴

Didalam penelitian ini, peneliti akan membaca berbagai referensi baik berupa buku maupun artikel-artikel, disurat kabar maupun di internet yang berkenaan dengan UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 dan pengembangan kurikulum madrasah diniyah di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan, serta mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan. Sehingga wawancara peneliti akan lebih tajam untuk memeriksa data secara valid.

c. Observasi mendalam

Observasi mendalam ini dilakukan bertujuan untuk menemukan ciri dan unsur yang tepat dan kongruen dengan kata kunci (fokus) permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan dengan pengamatan yang lebih rinci dan kesinambungan terhadap segenap unsur permasalahan yang terkait.

¹⁴ Ibid, ..., h.272

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.
- Bab II : Kajian Teori. Pada bab ini membahas beberapa tinjauan teori dari penelitian, yakni tentang UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 yang meliputi : definisi, fungsi, tujuan UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 dan tinjauan tentang pengembangan kurikulum madrasah diniyah yang meliputi : pengertian pengembangan kurikulum, pengertian madrasah diniyah, perkembangan madrasah diniyah, kurikulum madrasah diniyah serta Implementasi UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 dalam pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah.
- Bab III : Laporan Hasil Penelitian yang meliputi: Paparan gambaran umum lokasi penelitian, Paparan penelitian tentang pengembangan kurikulum di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan, dan paparan hasil penelitian tentang implementasi UU Sisdiknas no.20 tahun 2003 dalam pengembangan kurikulum madrasah diniyah di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan.

- Bab IV : Analisis Hasil Penelitian. Dalam bab ini memaparkan analisa hasil penelitian tentang pengembangan kurikulum madrasah diniyah di MadrasahMiftahul Ulum Sidogiri Pasuruan serta analisa tentang implementasi UU Sisdiknas no.20 tahun 2003 dalam pengembangan kurikulum madrasah diniyah di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan.
- Bab V : Penutup. Merupakan bagian akhir yang berisi Simpulan dan jawaban atas rumusan masalah serta berisi tentang Saran.